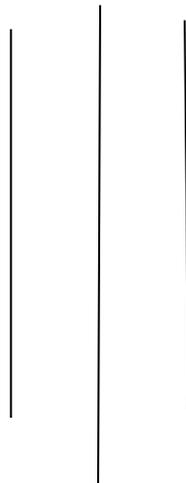




LAPORAN

**KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-
2024 DALAM RANGKA PENIJAUAN INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI KE KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 11 – 15 OKTOBER 2023**



**KOMISI V DPR-RI
JAKARTA, 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 3 |
| I.1. Dasar Hukum..... | 3 |
| I.2. Maksud dan Tujuan | 3 |
| I.3. Lokasi dan Waktu | 4 |
| I.4. Agenda Kunjungan | 4 |
| II. KEGIATAN PADA KUNJUNGAN KERJA..... | 5 |
| II.1. Pemaparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 6 |
| II.2. Pemaparan Mitra Komisi V DPR RI..... | 9 |
| II.3. Diskusi dan Pemdalaman anggota Komisi V DPR RI | 21 |
| II.4. Kesimpulan dan Rekomendasi | 23 |
| III. PENUTUP..... | 24 |
| LAMPIRAN:..... | 25 |
| 1. Foto Kegiatan | 255 |
| 2. Lampiran Surat Gubernur Kalimantan Barat | 42 |



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI V DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024
DALAM RANGKA PENINJAUAN INFRASTRUKTUR DAN TRANSPORTASI
KE KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TANGGAL 11 – 15 OKTOBER 2023**

=====

I. PENDAHULUAN

I.1. Dasar Hukum

1. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945; pada perubahan Pertama Pasal 20, Perubahan Kedua Pasal 20 A, perubahan Ketiga Pasal 23;
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.
4. Hasil Keputusan Rapat Intern Komisi V DPR RI tanggal 22 Agustus 2023.

I.2. Maksud dan Tujuan

Maksud Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat adalah:

- a. Untuk melihat dan mendiskusikan secara langsung pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- b. Untuk mengetahui dan menginventarisir permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat.
- c. Untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi yang pembiayaannya melalui APBN yang telah, sedang berjalan dan perencanaan kedepannya.

Tujuan dilaksanakannya kunjungan kerja adalah dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas Dewan sesuai dengan Pasal 59, ayat (4), Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib, yaitu:

butir a. *melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya;*

butir d. *melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.*

Selanjutnya Tata Tertib DPR RI Pasal 60 ayat (3) juga menyatakan bahwa: "Dalam melaksanakan tugas komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4) dan tindak lanjut pengaduan masyarakat, komisi dapat:"

butir f *mengadakan kunjungan kerja dalam masa reses atau mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, yang hasilnya dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindaklanjuti.*

I.3. Lokasi dan Waktu

Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 pada tanggal 11 – 15 Oktober 2023, yang dipimpin oleh Bapak **Lasarus, S.Sos., M.Si (A-242/F-PDIP/Dapil Kalimantan Barat II)**.

I.4. Agenda Kunjungan

Agenda kegiatan dalam Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Barat adalah dengan lokasi kegiatan pertemuan di kantor Kediaman Bupati Kabupaten Kapuas Hulu, peninjauan ke lokasi Pembangunan Penataan Kawasan depan Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu; Penataan *Water Front* Siluk, Peningkatan Instalasi Air Minum (IPA) SPAM IKK Mentebah; Pembangunan Pile Slab Nanga Semangut - Putussibau (Tahap II) di Kalis Pemeliharaan berkala Danau Sinau di Desa Jaras, Peningkatan Kapasitas Instalasi Pegolahan Air (IPA) SPAM IKK di Suai Putussibau Selatan, peninjauan Jalan Paralel Perbatasan (Nanga Era – Batas Kaltim), dan peninjauan di Jembatan Gantung Sepankareho di Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu.

II. Kegiatan Pada Kunjungan Kerja

Melakukan pertemuan di ruang pertemuan Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu dengan acara sebagai berikut:

II.1. Pemaparan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

A. Proyek Prioritas Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2023

Berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 841/DPUPR/2022, tentang Ruas-ruas jalan menurut status dan Fungsinya sebagai Jalan Provinsi di Kalimantan Barat. Berikut daftar proyek strategis Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat TA 2023:

- Pelebaran Jalan Batas Kota Pontianak – Sungai Kakap;
- Peningkatan Jalan Tumbang Titi – Tanjung;
- Peningkatan Jalan Tanjung – Marau – Air Upas;
- Peningkatan Jalan Air Upas – Siduk;
- Peningkatan Jalan Siduk – Sukadana;
- Peningkatan Jalan Sukadana – Teluk Batang;
- Peningkatan Jalan Batas Kota Singkawang – Bengkayang;
- Peningkatan Jalan Sungai Durian – Rasau Jaya (DAK);
- Peningkatan Jalan Sekadau – Rawak;
- Peningkatan Jalan Bodok – Meliau;
- Peningkatan Jalan Semubuk – Sintang 1;
- Peningkatan Jalan Sayan – Kota Baru (DAK);
- Peningkatan Jalan Sidas Simpang Tiga;
- Peningkatan Jalan Pahlawan – Batas Kota Singkawang;
- Peningkatan Jalan Nanga Taman – Nanga Mahap;
- Peningkatan Jalan Kembayan – Balai Sebut;
- Peningkatan Jalan Balai Sebut – Balai Sepuak;
- Peningkatan Jalan Balai Semubuk – Sintang 2 (DAK);
- Peningkatan Jalan Simpang Medang – Nanga Mau (DAK);
- Peningkatan Jalan Pak Mayam – Nahaya – Simpang Amboyo Selatan;
- Peningkatan Jalan Bengkayang – Suti Semarang;
- Kegiatan Penanganan Jalan Program Hibah Jalan Daerah (PHJD);

- Penggantian/Pembangunan Jembatan Marsedan;
- Peningkatan Jalan Simpang Sei. Gantang – Teluk Batu (DAK);
- Peningkatan Jalan Batas Kota Ketapang – Pesaguan – Kendawangan;
- Peningkatan Jalan Kota Baru – Nanga Sokan; dan
- Peningkatan Jalan Nanga Mau – Tebidah.

Panjang Ruas Jalan Provinsi Kalimantan Barat adalah 1.534,75 Km, terdiri atas 73 Ruas Jalan dengan kondisi Baik 581,12 Km (37,86%), Kondisi Sedang 528,21 Km (34,42%), Kondisi Rusak Ringan 394,93 Km (25,73%) dan Rusak Berat 30,50 Km (1,99%).

Pembangunan infrastruktur jalan sepanjang tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 meliputi pembangunan rekonstruksi pelebaran jalan, menambah jalur, dan pemeliharaan berkala. Setiap Tahunnya kondisi kemantapan jalan terus membaik. Pada tahun 2018 kondisi kemantapan jalan 49,71% sedangkan pada tahun 2022 sebesar 72,28%.

Adapun Strategi penanganan Jalan Provinsi Kalimantan Barat meliputi :

- Prioritas peningkatan jalan mendukung utama pendorong pertumbuhan ekonomi;
- Optimalisasi pemeliharaan jalan menuju fungsional;
- Kolaborasi penanganan jalan dengan perusahaan (tambang/kebun dan hutan);
- Optimalisasi belanja dengan tetap mempertahankan efektifitas;
- Meningkatkan manajemen penanganan jalan;
- Meningkatkan koordinasi penanganan jalan/guna konektivitas – jalan Nasional/ Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten/kota;
- Pendanaan melalui Hibah/APBN/DAK.

B. Kajian Status Bandara Internasional Supadio Kubu Raya Kalbar

Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya saat ini masih statusnya sebagai *Entry Point* Penerbangan Internasional. Sebelum Pandemi Covid-19 penerbangan melayani rute Pontianak – Kuching, Pontianak – Kuala Lumpur dan Pontianak – Miri. Namun saat Pandemi Covid-19 penerbangan ke Luar Negeri ditutup dan hanya melayani penerbangan Domestik.

Pasca Pandemi Covid-19 kembali sangat diharapkan reaktivasi Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai entry point perjalanan luar negeri wilayah Indonesia guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi *Covid-19*, melalui upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda udara melalui Bandar Udara Supadio Kubu Raya;
2. Tindak lanjut rencana program kerja sama multilateral Brunei Darussalam, Malaysia, dan Philippines (BIMP EAGA) khususnya terkait investasi perdagangan, ekonomi dan pariwisata yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022 jo Program BIMP-EAGA – Republic of Korea Cooperation Fund (BKCF) secara lebih inklusif dalam sektor konektivitas, pariwisata, lingkungan, dan pertanian-perikanan, Jakarta, 22 Juli 2023;
3. Tindak lanjut program kerja bilateral Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO) yang dilaksanakan di Kuching – Sarawak pada tanggal 19 – 22 September 2023;
4. Usulan dan pendapat dari berbagai pihak di antaranya Pemerintah Negeri Sarawak melalui Konsulat Malaysia yang berkedudukan di Pontianak, terkait permohonan pengoperasian kembali penerbangan di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya;
5. Permohonan dari *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA) media ANTARA tanggal 23 September 2023 terkait harapan untuk dibukanya membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Supadio;

6. Pernyataan kesiapan maskapai domestic yang siap untuk melayani penerbangan internasional pada bandara internasional Supadio – Kubu Raya Kalbar diantaranya :
 - *Maskapai City Link.*
 - *Maskapai Lion Air.*
7. Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya – Pontianak, dipersiapkan sebagai salah satu embarkasi Pelaksanaan Ibadah Haji, dari Provinsi Kalimantan Barat.
8. Telah ditetapkan 3 entry point untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kalimantan Barat yakni Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Aruk (Kabupaten Sambas) serta telah dibangun PLBN Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang).

Oleh karena itu dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan di atas, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meminta kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia untuk mengoperasikan kembali Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai entry point perjalanan luar negeri wilayah Indonesia guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat.

II.2. Pemaparan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Proyek Prioritas Kabupaten Kapuas Hulu

Secara geografis Kabupaten Kapuas Hulu berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia Timur dimana terdapat 6 (enam) kecamatan Puring Kencana, Badau, Batang Lupar, Embaloh HULU, Putussibau Utara dan Putussibau Selatan. Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu berharap supaya pemerintah pusat menghadirkan infrastruktur yang layak dan setara yang bermanfaat untuk masyarakat.

Penanganan banjir menjadi perhatian Pemerintah Kapuas Hulu mengingat setiap tahun selalu terjadi banjir ketika musim hujan. Rehabilitas sejumlah danau baik di pusat kota Putussibau maupun di

daerah yang sering terjadi banjir adalah menjadi solusi untuk mengatasi banjir. Hingga tahun 2022 terdapat 5 danau yang sudah dilakukan normalisasi dari 268 danau yang ada di Kapuas Hulu.

Selain Normalisasi Danau dalam penanganan banjir, di ruas Jalan Nasional yang tergenang banjir perlu dibangun Pile Slab agar lalu lintas transportasi jalan darat lancar tanpa kendala.

Pembangunan sarana air bersih untuk masyarakat di daerah padat penduduk dan sulit mendatangkan air bersih secara gravitasi sangat diperlukan mengingat pusat penyedia air bersih sudah tidak layak konsumsi akibat dampak pembangunan dan kerusakan lingkungan.

Akses penumpang barang menjadi perhatian untuk ditingkatkan yang dipengaruhi oleh kelancaran aksesibilitas transportasi bersentuhan dengan harga-harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu.

Beberapa pembangunan Infrastruktur di wilayah paralel perbatasan, ruas jalan, serta pembangunan terminal bandara Pangsuma sudah berjalan dan dimohonkan berkelanjutan agar pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu terlaksana dengan baik.

II.3. Pemaparan Mitra Komisi V DPR RI

1. Kementerian PUPR

A. Direktorat Jenderal Cipta Karya

1) Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Depan Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu

Salah satu prioritas pembangunan Pemerintah Kapuas Hulu Tahun 2023 adalah *Waterfront City* yang merupakan salah satu konsep pengembangan daerah pesisir atau tepian air di Sungai Kapuas yang berada di kawasan rumah kediaman Bupati Kapuas Hulu dengan tujuan Kota Putussibau memiliki tempat rekreasi.

Lokasi *Waterfront City* tepat dibawah samping Jembatan Kapuas Putussibau. Di Taman Alun Putussibau - Kapuas Hulu ini, juga tersedia berbagai sarana taman seperti

Gazebo, kursi taman, arena bermain anak dan ada pujasera yang menjajakan macam-macam kuliner Penataan water Front Siluk meliputi Plaza, Taman dan Waterfront, tangga Tribun, Pedestrian dan drainase, Tempat Parkir, Patung Arwana, Street Furniture, Pedestrian, Toilet dan Menara Air, Fitness Outdoor, Dermaga, dan Tempat Pembuangan sampah.

Akses ke lokasi kegiatan dari ibu kota provinsi Pontianak sejauh 584 kilometer dan dapat ditempuh dengan transportasi darat selama kurang lebih 14 jam.

2) _Rehabilitasi Rumah Betang Lunsia Hilir

Rumah Betang (Soo Langke) menjadi tempat kediaman masyarakat Sub Suku Dayak Taman turun temurun. Rumah Betang ini didirikan Pada tahun 1942. Rumah Betang ini didirikan Pada Tahun 1942. Rumah Betang Lunsia Hilir telah mengalami 2 (Dua) Kali perbaikan. Perbaikan yang pertama dilakukan sekaligus untuk memindahkan beranda (Ta 's o o) menjadi menghadap ke Jalan Raya. Sebelumnya Ta 's o o menghadap ke Sungai, karena Sungai merupakan hal sakral bagi suku Dayak Taman.

Adapun tujuan Rehabilitasi Rumah Betang Lunsia Hilir adalah adanya peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam hal pelestarian bangunan gedung cagar budaya (BGCB). Rehabilitasi dilakukan secara keseluruhan adalah 30 pintu di Rumah Betang Lunsia Hilir, yang pembangunannya menggunakan pembiayaan APBN tahun 2023 sebesar Rp. 20,3 miliar yang pekerjaannya dimulai sejak April 2023 dan akan selesai sesuai kontrak di akhir November 2023.

Lingkup pekerjaannya berupa Pekerjaan Rehabilitasi Bangunan Utama Rumah Betang, Pekerjaan Bangunan Servis, Pekerjaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) & Perkerasan Jalan, Pekerjaan Dapur Komunal, Pekerjaan Penataan Kawasan, dan Pekerjaan Mekanikal Elektrikal.

3) Peningkatan Kapasitas Instalasi Pegolahan Air (IPA) SPAM IKK di Suai Putussibau Selatan.

Pelayanan IPA Putussibau Selatan dengan jumlah Penduduk 17.430 Jiwa melayani 8 Desa yaitu Ds.Kedamin Hulu, Ds.Kedamin Hilir, Ds. Kedamin Darat, Ds. Jaras, Ds. Tanjung Jati, Ds. Sungai Uluk, Ds. Melapi dan Teluk Sindur Kec. Bika. Pelayanan IPA Eksisting dengan kap. 30 L/dt sampai saat ini hanya melayani 2.937 SR. sehingga perlu penambahan unit IPA sebesar 40 L/dt. Pekerjaan ini dilakukan melalui pendanaan rupiah murni secara multiyears TA. 2022 – 2023.

Lingkup kegiatan Peningkatan Kapasitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM IKK di Suai Putussibau Selatan adalah Pekerjaan IPA Baja 40 L/det, Pekerjaan Pondasi Beton IPA, Pekerjaan Reservoir 500 M3, Pekerjaan Bangunan Rumah Kimia, Pekerjaan Bangunan Kantor, Pekerjaan Bangunan Rumah Pompa, Pekerjaan Intake Ponton, dan Pekerjaan Jaringan Pipa.

Akses dari Kota Pontianak menuju lokasi pekerjaan memiliki jarak tempuh 636,9 km dengan waktu tempuh selama 14 jam. Lokasi pekerjaan di Ibu Kota Kecamatan Putussibau Selatan (Kedamin).

Pembiayaan Peningkatan IPA Kap.40 L/dt (e-katalog) menggunakan anggaran APBN sebesar Rp. 10.447.775.000 dan Rp. 12.945.914.908 (MYC). Sedangkan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung menggunakan anggaran sebesar Rp. 28.400.000.000 (TA. 2023) dan Rp. 31.397.866.000 (MYC).

4) Peningkatan Instalasi Air Minum (IPA) SPAM IKK Mentebah

Reservoir adalah tempat penyimpanan air untuk sementara sebelum didistribusikan kepada konsumen jika diperlukan suatu waktu. Penduduk di ibu Kecamatan Mentebah belum

se penuhnya mendapatkan layanan air minum dari PDAM, awalnya penduduk mendapatkan layanan air minum dari system grafitasi (Bronkaptering) namun karena sumber air yang ada mengalami penurunan sehingga PDAM Berinisiatif untuk tetap mengalirkan air ke pelanggan dengan cara mengalirkan air dari sungai Pengkadan.

Pembangunan IPA Kapasitas 20 L/Dt SPAM IKK Mentebah Kab. Kapuas Hulu dengan jumlah penduduk total Kecamatan Mentebah 11.170 Jiwa dan 3.105 KK terdiri dari 8 desa, dengan Wilayah Pelayanan rencana 3 Desa yaitu Desa Nanga Mentebah Desa Tanjung Intan dan Desa Menarin dengan jumlah 1.080 KK, Jumlah Sambungan Rumah eksisting saat ini (SR) aktif hanya sebesar 482 unit.

Peningkatan Instalasi Air Minum (IPA) SPAM IKK Mentebah meliputi pekerjaan IPA Kap. 20 L/dt, Pekerjaan Reservoir 350 M3, Pekerjaan Bangunan Rumah Kimia, Pekerjaan Bangunan Kantor, dan Pekerjaan Jaringan Pipa Distribusi Waktu tempuh menuju Peningkatan Instalasi Air Minum (IPA) SPAM IKK Mentebah ± 12,5 jam dengan jarak 572,4 Km dari Kota Pontianak, Ibu kota Propinsi Kalimantan Barat Menggunakan Transportasi Darat.

Pembiayaan Peningkatan IPA Kap.20 L/dt (E- Katalog) menggunakan APBN 2023 sebesar Rp. 1.567.278.000 dan Rp. 8.016.762.000 (MYC). Sedangkan Pembangunan Jaringan Perpipaan dan Bangunan Pendukung menggunakan APBN TA 2023 sebesar Rp. 4.920.519.000 dan Rp. 8.919.638.000 (MYC).

B. Direktorat Sumber Daya Air (SDA)

1. Pemeliharaan/Normalisasi Danau Jaras

Pemeliharaan/normalisasi Danau Jaras berada di Kecamatan Putussibau Selatan Pusat Kota yang pembangunannya merupakan aspirasi masyarakat Kapuas Hulu yang didorong Pemkab Kapuas Hulu.

Pada Proses normalisasi sudah cukup baik, semula 3 hektar namun saat ini menjadi 56 hektar dengan daya tampung air 1,8 juta meter kubik. Tujuan normalisasi Danau Jaras adalah mengurangi banjir yang kerap terjadi dimusim hujan setiap tahun yang menggenangi pemukiman warga. Dilakukannya normalisasi Danau Jaras maka daya tampung air menjadi lebih banyak sehingga air yang tadinya meluap menjadi cepat masuk di Danau Jaras sehingga mengurangi dampak banjir di Ibukota Kapuas Hulu. Selain itu tujuan normalisasi ini adalah mengamankan asset negara dimana tanah- tanah (tapal kuda) yang berada didanau ini merupakan ex sungai Kapuas, apa bila dibiarkan terus menerus akan digarap oleh masyarakat.

Normalisasi Danau Jaras ini merupakan swakelola Kementerian PUPR sektor Unit Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Wilayah Sungai Kalimantan I.

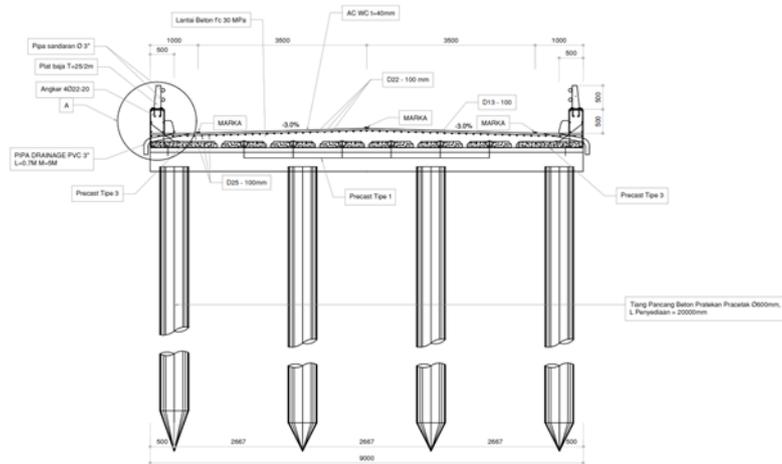
C. Direktorat Bina Marga

1). Pembangunan Pile Slab Nanga Semangut - Putussibau (Tahap II) di Kalis.

Pembangunan Pile Slab Nanga semangut – Putussibau merupakan kelanjutan dari pembangunan Pile Slab Semangut – Putussinbau Tahap I pada Tahun Anggaran 2021 s/d 2022, dengan alokasi Rp 67.925.238.000,00 yang sudah selesai pekerjaan.

Pada Tahap II ini, pembangunan Pile Slab menangani Panjang 1000 meter, lebar badan jalan 7 meter, lebar bahu jalan 1 meter, tipe lajur lalu lintas 2/2 UD, dan lebar per jalur 3,5 meter pada Periode tahun anggaran 2023 s/d 2024, dengan alokasi Rp 114.367.880.000,00. .

Sepanjang Pile Slab tidak terpasang Penerangan Jalan Umum (PJU).



2). Peninjauan Jalan Paralel Perbatasan (Nanga Era – Batas Kaltim).

Pembangunan Jalan Paralel (Nanga Era – Batas Kaltim) menghubungkan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat dengan Perbatasan Provinsi Kalimantan Timur.

Pekerjaan dilaksanakan selama 18 (Delapan belas) bulan. Periode tahun anggaran 2022 s/d 2024 (target selesai Mei 2024) dengan alokasi Rp 148.792.088.000,00 bersumber dari SBSN. Target penanganan 24,88 Km (kondisi aspal), Lebar badan jalan 6,00 meter, Lebar bahu jalan 1,50 meter. Pelaksanaan Pekerjaan 2022 - 2024 (18 Bulan) Target Selesai Mei 2024.



3). Peninjauan di Jembatan Gantung Sepankareho

Pembangunan Jembatan Gantung Sepankareho menghubungkan Desa Kereho sejauh 82 km dengan jalan akses menuju Kabupaten Putussibau Pelaksanaan Pekerjaan 165 Hari Kalender pada TA. 2022 dengan alokasi Rp. 13.659.723.000,00, dengan Panjang Bentang Jembatan 120 meter, lebar jembatan 1,8 meter, lebar jalan pendekat 3,0 metetr, dan pondasi Borepile Ø600 mm.

Pembangunan Jembatan Gantung Sepan Kareho menghubungkan Jalan Pararel (Nanga Era – Batas Kaltim) dengan Desa Sepan Kareho, Desa Salin, Desa Belukang, dan Desa Tanjung Lokang.

(Kota Pontianak), dengan kategori PKP – PK V (lima), Pelayanan LLAU AFIS, dan pesawat terbesar yang beroperasi adalah ATR 72 – 600.

Rencana Induk (Master Plan) Pembangunan Bandara Pangsuma berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 207 Tahun 2021 sebagai berikut :

| FASILITAS | EKSINGTING | TAHAP I | TAHAP II |
|------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| RUNWAY | 1800 x 30 m ² | 1800 x 30 m ² | 2050 X 45 m ² |
| TAXIWAY A TAXIWAY B | 117 x 23 m ² | 117 x 23 m ² | 109,5 x 23 m ² |
| APRON | 143 x 80 m ² | 165 x 80 m ² | 235 x 90 m ² |
| TERMINAL | 1.020 m ² | 4.328 m ² | 9.576 m ² |

3. Progres Pembangunan Sarana Prasarana BMKG dan BASARNAS di Provinsi Kalimantan Barat

A. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG)



S L I (Sekolah Lapang Iklim)








BMKG telah melaksanakan SLI di Kalimantan Barat sejak tahun 2012 hingga 2023 sebanyak **24** kali yang terdiri dari :

- 7 kali SLI Tahap II di **Kota Pontianak**
- 3 kali SLI Tahap III di **Kab. Kubu Raya, Sambas dan Mempawah**
- 3 kali Sosialisasi Agroklimat di **Kota Pontianak**
- 10 kali SLI Operasional, di **Kab. Kubu Raya (3), Mempawah (4), Landak (1) dan Sintang (2)**
- 1 kali SLI Tematik di **Kota Pontianak**

Total peserta sejak 2012 hingga sekarang adalah:

793

 orang.



KALEIDOSKOP IKLIM KALBAR (1985-2022)





Curah Hujan Maksimum



384mm 19 Nov 2005
Harian (Selakau, Sambas)

820mm April I, 1985
Dasarian (Lanjak, Kapuas Hulu)

1699mm April 1985
Bulanan (Lanjak, Kapuas Hulu)

7562mm 2022
Tahunan (Batang Tarang, Sanggau)

Suhu dan RH Ekstrem

MAX : 40°C
08 Agustus 1994
Sta. Met. Nanga Pinoh, Melawi

MIN : 15°C
26 Juli 1994
Sta. Met. Nanga Pinoh, Melawi

Tekanan Udara Ekstrem

MAX : 1020.9mb
07 September 1995
Sta. Klim. Kalimantan Barat

MIN : 1000mb
• Sta. Met. Nanga Pinoh, Melawi
• Sta. Met. Susilo, Sintang

Kec. Angin Maksimum

62 knot
Dari Barat Laut
22 Januari 2019
Sta. Met. Rahadi Oesman, Ketapang





RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN MKG TAHUN 2023





RENCANA SEKOLAH LAPANG IKLIM TA.2024

| Kegiatan | Volume Pelaksanaan | Target Output |
|-----------------|--------------------|-----------------|
| SLI Operasional | 1 Kegiatan | 30 Orang |
| SLI Tematik | 1 Kegiatan | 50 Orang |
| Total | 2 Kegiatan | 80 Orang |

RENCANA SEKOLAH LAPANG CUACA NELAYAN TA.2024

| Kegiatan | Volume Pelaksanaan | Target Output |
|--------------|--------------------|------------------|
| SLCN | 1 Kegiatan | 100 Orang |
| Total | 1 Kegiatan | 100 Orang |



S L C N (Sekolah Lapang Cuaca Nelayan)



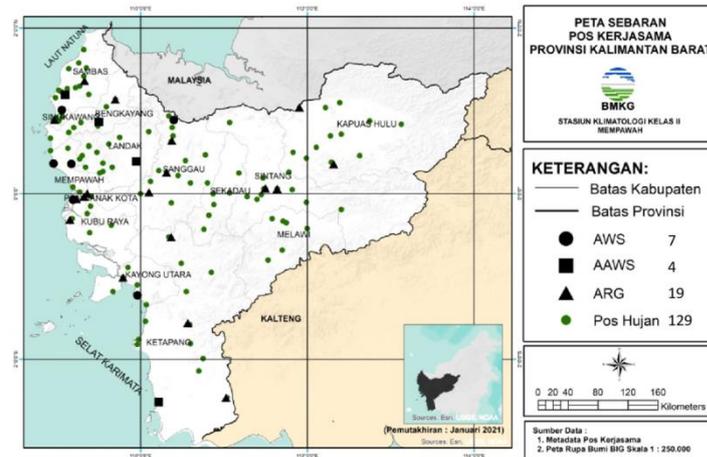
BMKG telah melaksanakan SLCN di Kalimantan Barat sejak tahun 2018 hingga 2023 sebanyak **6** kali yang terdiri dari :

- 3 kali pelaksanaan di Kota Pontianak (2018-2020),
- 1 kali di Kab. Bengkayang dan Kubu Raya (2021),
- 1 kali di Kab. Sambas (2022),
- 1 kali di Kab. Ketapang (2023).

Total peserta sejak 2018 hingga sekarang adalah **385** orang.



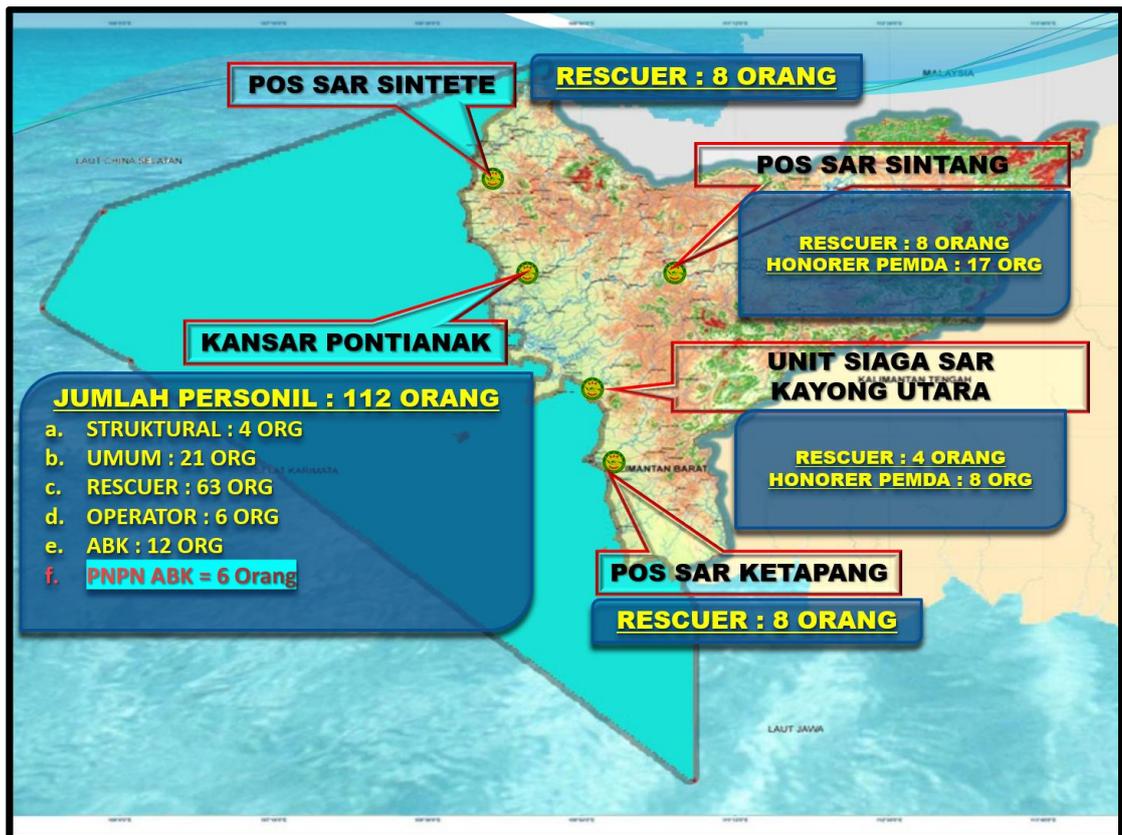
JEJARING PENGAMATAN IKLIM



Pos Hujan Kerjasama di wilayah Kalimantan Barat, terdiri dari:

- Automatic Weather Station (AWS) » 7 titik
- Automatic Agroclimate Weather Station (AAWS) » 4 titik
- Automatic Rain Gauge (ARG) » 19 titik
- Pos Hujan » 129 titik

B. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP)/BASARNAS



Solusi yang ditempuh terhadap permasalahan terkait jumlah SDM; Sarana dan Prasarana; serta jangkauan daerah yang sangat luas:

- Penambahan Jumlah SDM/Pegawai (PNS/PPPK), Pembinaan Potensi SAR yang ada di wilayah kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Pontianak;
- Peningkatan Status Unit Siaga SAR Kayong Utara menjadi Pos SAR Kayong Utara;
- Penambahan SDM khusus di Kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi yang sesuai;
- Adanya Anggaran terkait Pelaksanaan Siaga Rutin PPNPN;
- Tambahan Anggaran dalam Pelaksanaan Siaga SAR Khusus, karena banyaknya kegiatan rutin Pemerintah Daerah seperti Pariwisata, Olahraga, dan Keagamaan;
- Penambahan Jumlah Sarana SAR (Rescue Car, RIB, Bus $\frac{3}{4}$, Speed Boat);
- Penambahan Rescue Boat 40 M Alluminium di Kabupaten Kayong Utara, Pelabuhan Teluk Batang, dimana Rescue Boat 36 M Fiber yang dimiliki saat ini tidak memadai untuk pelaksanaan operasi SAR dengan ketinggian ombak sampai dengan 2 meter;
- Pengadaan Lahan Dermaga di Sungai Rengas Kab. Kubu Raya untuk RB. 214 yang saat ini bersandar di sungai Durian.

II.3. Diskusi dan Pendalaman Anggota Komisi V DPR RI

- Seluruh mitra Komisi V DPR RI agar mendukung sepenuhnya pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi untuk mewujudkan konektivitas di Kabupaten Kapuas Hulu.
- Usulan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa perlunya mendapat perhatian sepenuhnya kepada mitra Komisi V DPR RI dan Kementerian Perhubungan agar segera mengoperasikan kembali Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai entry point perjalanan luar negeri wilayah Indonesia disambut baik guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat.
- Terhadap proses penormalisasi Danau Jaras penting dilakukakan dengan tuntas, selain bertujuan mengurangi dampak banjir yang sering terjadi

- setiap tahun juga mengamankan asset Negara terhadap tanah (tapal kuda) exs Sungai Kapuas.
- Terhadap pembangunan Pile Slab di Nanga Semangut – Putussibau Kecamatan Kalis perlu pemasangan Penerangan Jalan Umum sepanjang Pile Slab.
 - Rehabilitasi Rumah Betang Lusa Hilir supaya dapat diselesaikan tepat waktu agar dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar guna meningkatkan pertumbuhan Wisata yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kapuas Hulu. Rumah Betang Lusa Hilir merupakan salah satu rumah bentang yang masih ada dan dipelihara sebagai cagar budaya di Kabupaten Kapuas Hulu.
 - Terhadap Pembangunan jalan Pararel Perbatasan, Kementerian PUPR diminta untuk segera menuntaskan pengaspalan jalan pararel perbatasan yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur setidaknya di Desa Sepan Kareho.
 - Pembangunan Jembatan Gantung Sepan Kareho sangat bermanfaat bagi masyarakat sebagai penghubung dengan jalan Pararel Perbatasan (nanga Era – Batas Kaltim). Selanjutnya masyarakat meminta Komisi V DPR RI untuk turut membangun jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan serta akses sosial ekonomi masyarakat di Desa Sepan Kareho.
 - Pembangunan Bandar Udara Pangsuma diharapkan menggambarkan kearifan lokal masyarakat Kapuas Hulu. Selain mengutamakan aspek teknis, dapat pengerjaannya diharapkan mendapat pendampingan dari Kejaksaan Negeri Putussibau.
 - Terhadap pembangunan penataan kawasan kediaman Bupati Kapuas hulu turut membangun kembali Patung Burung Garuda yang pernah ada sebagai pentanda pengingat kemerdekaan Indonesia.
 - Perlunya semua pihak menangani dan mencegah adanya kerusakan DAS Sungai Kapuas, agar pemanfaatan yang salah satunya berkaitan penyediaan air bersih pada masa mendatang dapat terus dimanfaatkan oleh masyarakat;

- Perlunya segera direncanakan dan dilaksanakan pembangunan jalan dan jembatan yang strategis di Kabupaten Kapuas Hulu beberapa jalan tersebut mengalami rusak berat dan hanya dilakukan perbaikan memadai;
- Perlu perencanaan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi yang lebih strategis dan komplit, tidak menunggu permasalahan dulu baru dilakukan pembangunan;
- Pada pembangunan sejumlah sarana prasarana Infrastruktur transportasi udara perlunya keterlibatan serta kordinasi dengan BMKG dan BASARNAS, agar pemanfaatan udara oleh masyarakat dapat terjamin kelancaran dan keselamatannya;
- Peningkatan konektifitas transportasi baik darat maupun udara di Kapuas Hulu perlu diwujudkan oleh pemerintah, agar biaya transportasi, waktu tempuh dan hubungan perekonomian antar masyarakat di Kabupaten Kapuas Hulu dapat lebih lancar dan terjangkau;
- Berkaitan dengan pengerukan Danau di Kapuas Hulu perlu mendapat perhatian kepada stake holder terkait;
- Tanggapan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu agar seluruh mitra Komisi V DPR RI meningkatkan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

II.4. Kesimpulan dan Rekomendasi

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi yang diperoleh dari Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022 – 2023 ke Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

1. Komisi V DPR RI meminta seluruh mitra agar pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu segera dilakukan dan dilaksanakan, baik pada masa APBN tahun 2023 maupun tahun 2024;
2. Komisi V DPR RI meminta pemerintah segera mengoperasikan kembali Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai entry point Perjalanan Luar Negeri Wilayah Indonesia guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat.
3. Komisi V DPR RI meminta pembangunan infrastruktur Jalan Paralel Perbatasan (Nanga Era – Batas Kaltim) segera menyelesaikan

pembangunannya sampai tuntas agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;

4. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR untuk melakukan normalisasi Danau danau yang ada di Kapuas Hulu untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi setiap tahun.

III. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI pada Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 ke Kabupaten Kapuas Hulu yang dilaksanakan pada tanggal 11-15 Oktober 2023. Laporan ini menjadi masukan bagi Komisi V DPR RI dan untuk dapat ditindaklanjuti Pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat .

Ketua Tim

ttd

LASARUS, S.Sos., M.Si
A-242

LAMPIRAN:

1. Foto Kegiatan Pertemuan di Kediaman Bupati Kapuas Hulu.



Peninjauan Pembangunan Infrastruktur dan Penataan Kawasan Depan Rumah Dinas Bupati Kapuas Hulu





Peninjauan Normalisasi Danau Jaras



Peninjauan SPAM Mentebah





Peninjauan SPAM Teluk Suai





Peninjauan Rumah Betang Lunsia Hilir







Peninjauan Jalan Paralel Perbatasan (Nanga Era – Batas Kaltim).





Peninjauan Jembatan Gantung Sepan Kareho



2. Lampiran Surat Gubernur Kalimantan Barat



GOVERNOR OF KALIMANTAN BARAT

Pontianak, 29 September 2023

Nomor : 500.11.1/4797/DISHUB.E
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Usulan Reaktivasi Bandar Udara
Internasional Supadio Kubu Raya
sebagai Entry Point Penerbangan
Internasional

Yth. Menteri Perhubungan RI

di
Jakarta

Terkait surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 550/4119/DISHUB tanggal 7 Nopember 2022 perihal diatas, kembali disampaikan usulan pembukaan bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai *Entry Point* Penerbangan Internasional dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Percepatan pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berupaya melakukan langkah-langkah strategis salah satunya melalui upaya peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Kalimantan Barat menggunakan moda udara melalui Bandar Udara Supadio Kubu Raya.
2. Program kerja sama multilateral Brunei Darussalam, Malaysia, dan Philippines (BIMP EAGA) khususnya terkait investasi perdagangan, ekonomi dan pariwisata yang dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 26 November 2022 jo Program BIMP-EAGA – Republic of Korea Cooperation Fund (BKCF) secara lebih inklusif dalam sektor konektivitas, pariwisata, lingkungan, dan pertanian-perikanan, Jakarta, 22 Juli 2023.
3. Program kerja bilateral Sosial Ekonomi Malaysia-Indonesia (SOSEK MALINDO) yang dilaksanakan pada 19 – 22 September 2023;
4. Masukan dari berbagai pihak diantaranya dari Pemerintah Negeri Sarawak melalui Konsul Malaysia yang berkedudukan di Pontianak, terkait permohonan pengoperasian kembali penerbangan di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya;
5. Masukan dari *Association of the Indonesia Tours and Travel Agencies* (ASITA) pada tanggal 27 Oktober 2022 perihal Permohonan Izin Pembukaan Kembali Penerbangan Internasional dan media ANTARA tanggal 23 September 2023 terkait harapan untuk dibukanya membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Supadio;

Jalan Ahmad Yani Telp. (0561) 736541 Faks. (0561) 730062 Pontianak
Website. www.kalbarprov.go.id

6. Pernyataan kesiapan maskapai untuk melayani penerbangan internasional pada bandara internasional Supadio – Kubu Raya Kalbar (terlampir)
7. Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya – Pontianak, dipersiapkan sebagai salah satu embarkasi Pelaksanaan Ibadah Haji, dari Provinsi Kalimantan Barat.
8. Telah ditetapkan 3 entry point untuk Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kalimantan Barat yakni Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu), Entikong (Kabupaten Sanggau) dan Aruk (Kabupaten Sambas) serta telah dibangun PLBN Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang).
9. Berkenaan pertimbangan pada angka 1 s/d 8 di atas, hal di atas, diharapkan berkenan bapak Menteri Perhubungan Republik Indonesia mengoperasikan kembali Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya sebagai *entry point* perjalanan luar negeri wilayah Indonesia guna mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi Kalimantan Barat.

Demikian harapan kami mohon dapat dipertimbangkan.



Pj Gubernur Kalimantan Barat

Harrison

Tembusan:

1. Ketua DPR RI Cq. Ketua Komisi V DPR RI;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI;
3. Menteri Dalam Negeri RI;
4. Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia RI;
5. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI;
6. Menteri BUMN RI selaku Ketua Tim Pelaksana KPC - PEN;
7. Wakil Menteri BUMN RI selaku Kepala Satgas PEN;
8. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
9. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Barat;
11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalimantan Barat;
12. Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I;
13. EGM PT. (Persero) Angkasa Pura II Bandar Udara Supadio Kubu Raya.